

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2017 .

Dalam rangka memenuhi kewajibannya Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas LKPD TA 2017 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini berdasarkan undang-undang Nomor 15 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 15 tahun 2004.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah Laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas pengendalian intern.

Pada hari ini tanggal 14 Mei 2018 BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2017 kepada DPRD dan Gubernur Kalimantan Tengah. LHP atas LKPD TA 2017 terdiri dari 3 laporan utama yaitu LHP atas LKPD TA 2017, LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 yang meliputi Pendapatan dengan realisasi sebesar Rp 4,100 triliun dari anggaran sebesar Rp 4,046 triliun, Belanja dan Transfer dengan realisasi sebesar Rp 3,686 triliun dari anggaran sebesar Rp 4,155 triliun, total asset sebesar Rp 10,001 triliun, ekuitas sebesar Rp 9,842 triliun, pendapatan LO sebesar Rp 3,907 triliun, dan beban LO sebesar Rp 3,589 triliun, serta surplus sebesar Rp 302,36 milyar.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per Desember 2017 atas rekomendasi BPK RI untuk laporan hasil pemeriksaan TA 2016 dan sebelumnya, mengungkapkan bahwa terdapat 1.183 rekomendasi senilai Rp 79,87 miliar. Dari rekomendasi tersebut, sebanyak 1020 rekomendasi senilai Rp 53,15 milyar atau 86,22 % dari keseluruhan rekomendasi, telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi; sebanyak 144 rekomendasi senilai Rp 8,16 miliar belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindaklanjut; serta sebanyak 19 rekomendasi senilai Rp.18,56 miliar tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas pengelolaan keuangan daerah TA 2017 yang sebagian besar sesuai dengan action plan yang dibuat oleh Gubernur, sehingga LKPD TA 2017 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2017 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, dan telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI.

Untuk itu, BPK RI memberikan opini "**Wajar Tanpa Pengecualian**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan LKPD Provinsi BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diantaranya: beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diantaranya:

Adanya temuan Sistem Pengendalian intern antara lain:

1. Pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBBKB) belum memadai, sehingga pada TA 2017 terjadi potensi kehilangan pendapatan sebesar 4,6 milyar;

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



2. Penetapan besarnya bagi hasil pajak daerah belum sesuai realisasi pendapatan, sehingga terjadi kekurangan penetapan transfer bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota sebesar Rp 75,5 milyar;
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum melakukan serah terima aset tetap yang berkaitan dengan pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kehutanan, kelautan, energy dan sumber daya mineral.
4. Pengelolaan aset tetap masih belum sepenuhnya memadai seperti belum lengkapnya informasi data aset tetap Kartu inventaris barang, beberapa aset tetap belum diketahui keberadaannya, beberapa biaya rehabilitasi atau perbaikan belum diatribusikan ke aset tetap induknya.

Temuan Ketidakpatuhan pada umumnya berupa kekurangan volume fisik pada beberapa kontrak pekerjaan pada beberapa SOPD, terutama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran.

BPK mengharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk secepatnya menindaklanjuti beberapa temuan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan aset tetap, karena jika tidak segera ditindaklanjuti tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi opini dimasa mendatang, mengingat akumulasi nilainya akan melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan.

berdasarkan data Buku "Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2017" dan Website Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah dapat diketahui dalam tiga tahun terakhir 2015, 2016 dan 2017 **beberapa indikator kesejahteraan di Provinsi Kalimantan Tengah lebih baik dibandingkan** dengan beberapa **indikator kesejahteraan secara nasional**, yaitu sebagai berikut:

1. **Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah** dalam tiga tahun terakhir yaitu 7,01%, 6,36% dan 6,74% atau nilai ini **lebih tinggi** dari pertumbuhan ekonomi nasional di tingkat 5,07%.
2. **Tingkat kemiskinan** dalam tiga tahun terakhir yaitu 5,91%, 5,36% dan 5,26% dimana tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 **lebih rendah dari** tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,17%;
3. **Tingkat pengangguran** dalam tiga tahun terakhir yaitu 4,54%, 4,82% dan 4,23% dimana tingkat pengangguran Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 **lebih rendah** dari tingkat pengangguran nasional sebesar 5,50%.

Namun demikian, jika dilihat dari indikator kemakmuran masyarakat lainnya seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan gini ratio, Kalimantan Tengah dalam tiga tahun terakhir memiliki IPM yaitu 68,53%, 69,13% dan 69,79% atau berada **dibawah IPM nasional** sebesar 70,18, demikian juga **gini ratio di Kalimantan Tengah** dalam tiga tahun terakhir berfluktuasi di tingkat 0,300%, 0,347% dan 0,327% atau **lebih rendah** dari gini ratio nasional sebesar 0,391%. Hal ini menandakan capaian pembangunan manusia yang masih rendah dan masih cukup tinggi ketimpangan antara orang kaya dan miskin di Kalimantan Tengah.

Harapannya pada tahun 2018 ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat meningkatkan ratio IPM diatas level rata2 nasional dan menurunkan gini ratio serta mampu meningkatkan lagi angka pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id